



MANAJEMEN ASET INFRASTRUKTUR PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Rani Mardiana¹

¹Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas MH Tamrin
Jakarta Timur

Email: ranimardiana89@gmail.com

Abstract

Public infrastructure asset management is an important aspect in improving public services at the regional government level. Infrastructure assets which include roads, bridges, buildings and other public facilities have a strategic role in supporting various social, economic and government activities. This research aims to analyze how public infrastructure asset management can contribute to improving the quality of public services in the region. Using a qualitative descriptive approach, this research identifies the challenges faced by regional governments in managing infrastructure assets, such as budget limitations, low coordination between agencies, and maintenance and rehabilitation problems. The research results show that efficient asset management and based on accurate data can improve the quality of public service accessibility. Therefore, an integrated asset management system is needed, increasing human resource capacity, and utilizing information technology to monitor and manage assets optimally. Implementation of this strategy is expected to increase transparency, accountability and performance of public services in regional government.

Keywords: *Asset management, public infrastructure, public services, regional government, efficiency.*

Abstrak

Manajemen aset infrastruktur publik merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah. Aset infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, gedung dan fasilitas umum lainnya memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen aset infrastruktur publik dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan aset infrastruktur, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya koordinasi antarinstansi, serta masalah pemeliharaan dan rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang efisien dan berbasis data yang akurat dapat meningkatkan kualitas keterjangkauan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen aset yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam memonitor dan mengelola aset secara optimal. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik di pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Manajemen aset, infrastruktur publik, pelayanan publik, pemerintahan daerah, efisiensi.

PENDAHULUAN

Menurut (Akbar, 2018) Manajemen Aset Infrastruktur (IAM) merupakan segala sesuatu yang mengacu pada proses pengoperasian, pemeliharaan, peningkatan dan penggantian aset infrastruktur dengan biaya efektif sepanjang siklus hidupnya. Proses ini menggabungkan praktik teknik, keuangan, dan pemeliharaan untuk memastikan bahwa

infrastruktur permintaan publik. Manajemen aset infrastruktur memastikan manajemen pemeliharaan, dan optimalisasi aset publik yang efisien seperti gedung, jalan, jembatan dan utilitas. Komponen utama IAM meliputi inventaris aset, penilaian kondisi, analisis biaya pemeliharaan dan perencanaan modal yang semuanya membantu memperpanjang umur dan aset dan mengurangi kegagalan yang mahal. Perangkat lunak manajemen aset menyederhanakan IAM dan memungkinkan kotamadya untuk mengoptimalkan kinerja (Suprayitno, 2018).

Manajemen Aset Infrastruktur (IAM) sangat penting bagi kotamadya dan lembaga publik. Prinsip-prinsipnya yang diterapkan memungkinkan lembaga untuk mengelola, memelihara dan mengoptimalkan aset pemerintah. Aset seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air, taman dan fasilitas kotamadya memerlukan perhatian yang signifikan. IAM yang efektif memastikan bahwa aset-aset ini menyediakan layanan yang andal dan tahan lama bagi publik sekaligus meminimalkan biaya dan gangguan. IAM memastikan bahwa infrastruktur publik berfungsi secara efisien. Pemerintah daerah bertugas memenuhi kebutuhan warga, Memelihara infrastruktur publik merupakan bagian penting dari tugas tersebut. Infrastruktur yang rusak dapat mengakibatkan perbaikan yang mahal, risiko keselamatan dan gangguan layanan (Hariyanto, 2014).

Peran utama IAM salah satunya melakukan optimalisasi sumber daya yaitu memastikan bahwa infrastruktur publik yang ada dapat digunakan dengan optimal, memperpanjang usia pakai aset, serta meminimalisasi biaya perawatan dan penggantian yang tidak perlu (Razif, 2018). Hal ini berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, hal ini akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas layanan publik, infrastruktur yang dikelola dengan baik akan mendukung peningkatan kualitas layanan publik, seperti transportasi, air bersih, energi dan fasilitas kesehatan atau pendidikan. Infrastruktur yang memadai dan terawat juga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat (Putra, 2024). Secara keseluruhan, manajemen aset infrastruktur publik yang efektif membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor pencapaian dalam manajemen aset infrastruktur publik cukup memiliki banyak aspek yang menyeluruh dan menyentuh langsung pada pengoperasian sebuah pemerintah daerah setempat. Infrastruktur dan fasilitas merupakan syarat dasar bagi pembangunan dan pertumbuhan. Keduanya bukan obyek sederhana dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, keterkaitan keduanya harus dikelola dengan aspek lingkungan sangat penting. Oleh karena itu, keduanya harus dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas (Soemitro & Suprayitno 2018; Suprayitno & Soemitro 2018).

Manajemen aset infrastruktur merupakan proses sistematis untuk mengelola memelihara dan mengoptimalkan aset fisik pemerintah daerah, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan dan gedung-gedung pelayanan publik (KURAMA, 2022). Manajemen aset sangat berpengaruh pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Manajemen aset memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki digunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik, seperti akses transportasi yang lebih baik atau fasilitas yang lebih memadai.

Keberlanjutan Pelayanan Publik juga berkaitan dengan output yang berasal dari manajemen aset infrastruktur publik. Dengan perencanaan dan pemeliharaan yang

terstruktur, aset infrastruktur dapat berfungsi secara berkelanjutan tanpa gangguan yang signifikan. Hal ini akan berdampak pada kualitas pelayanan publik, seperti penyediaan air bersih, listrik dan fasilitas umum lainnya dapat berjalan dengan baik, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Eka Putri, 2019). Manajemen aset infrastruktur berperan penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Penelitian Terdahulu

Manajemen aset infrastruktur publik memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintahan daerah. Pengelolaan aset yang efektif dan efisien dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan transparansi, dan memastikan keberlanjutan layanan kepada masyarakat.

Hasil Penelitian Terkini (2018-2024):

1. **Evaluasi Efektivitas Manajemen Aset Daerah di Banten (2024)**
Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan aset daerah, seperti kurangnya transparansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Rekomendasi yang diberikan meliputi penerapan tata kelola yang baik, penguatan regulasi, dan pengembangan sistem informasi manajemen aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Saepudin, 2024).
2. **Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (2023)**
Studi ini menekankan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik berdampak positif tidak hanya terhadap keuangan daerah tetapi juga kualitas pelayanan publik. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan BMD dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Hariyanto, 2023).
3. **Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset (2019):** Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen aset pada pengelolaan taman kota dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan serta pemanfaatannya oleh masyarakat. Hal ini berdampak positif pada kualitas lingkungan dan kepuasan warga (Akbar, 2019).
4. **Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal (2017):** Artikel ini membahas bahwa pengelolaan aset pemerintah yang berfokus pada efektivitas layanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya berpengaruh terhadap kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran negara. Aset infrastruktur yang signifikan mempengaruhi belanja pemerintah perlu dikelola dengan baik untuk menjaga fungsinya agar tetap optimal (Sidik, 2017).

Dari berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen aset infrastruktur publik yang efektif memerlukan:

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan aset memastikan bahwa aset digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
- **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah daerah dalam manajemen aset sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Implementasi sistem informasi manajemen aset dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan mempermudah monitoring serta evaluasi aset daerah.

- Perencanaan dan Pemeliharaan yang Tepat: Perencanaan yang matang dan pemeliharaan rutin terhadap aset infrastruktur memastikan keberlanjutan fungsi dan layanan kepada publik.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan aset infrastruktur yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen aset infrastruktur publik oleh pemerintah daerah telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan berbagai peraturan untuk memastikan pengelolaan aset yang efektif. Misalnya, keputusan Menteri Keuangan No 11/KM.7/2024 (KeMenKeu, Juli, 2024) tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD, yang mengharuskan pemerintah daerah mengidentifikasi dan menandai belanja infrastruktur pelayanan publik dalam anggaran mereka. Beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misalnya, menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM aparatur. Secara keseluruhan, upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan manajemen aset infrastruktur publik selama periode 2018-2024 telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah-langkah strategis seperti penyusunan regulasi, penerapan SPBE, pemanfaatan aset desa, dan inovasi dalam pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan aset dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

SARAN

Manajemen aset infrastruktur berperan penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. &. (2018). Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset. *urnal Teknik Sipil ITB*, 17(3), 171-180.
- Akbar, R. (2018). Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset. doi:10.5614/jts.2010.17.3.3
- Akbar, R. (2019). Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset. *Jurnal Teknik Sipil*, 17(3):171. doi:10.5614/jts.2010.17.3.3
- Authored by John D. Campbell, A. K. (2015). *Asset Management Excellence: Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions*. Dalam A. K. Authored by John D. Campbell, *Asset Management Excellence: Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions*. CRC Press.
- Batam, P. K. (2019). *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kota Batam*. Batam: Pemerintah Daerah.
- Eka Putri, M. (2019). *ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM OPTIMASI PENERIMAAN NASIONAL BUKAN PAJAK*. Disertasi Doktor, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI).
- Flowers, C. L. (2014). *Infrastructure Asset Management: Towards a Triple Bottom Line*. Dalam C. L. Flowers, *Infrastructure Asset Management: Towards a Triple Bottom Line*. ICE Publishing.
- HALAWA, E. D. (2015). Penentuan skala prioritas pembangunan aset infrastruktur pascagempa di

- Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, tahun 2015. *Jurnal Ekonomika Pembangunan*.
- Hariyanto. (2023). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah: Studi Kebijakan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Hariyanto. (2024). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah: Studi Kebijakan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Hastak, A. S. (2018). *Infrastructure Planning and Management: An Integrated Approach*. Dalam A. S. Hastak, *Infrastructure Planning and Management: An Integrated Approach*. wiley.
- Initiative, I. I. (t.thn.). *Manajemen Aset Infrastruktur di Indonesia*. Prakarsa, 45333.
- KeMenKeu. (Juli, 2024). Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia .
- KURAMA, L. J. (2022). anajemen Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Oleh Badan Lengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(117).
- Lee, G. L. (2014). *Asset Management for Civil Infrastructure: Approaches and Challenges*. Dalam G. L. Lee, *Asset Management for Civil Infrastructure: Approaches and Challenges*. ASCE Library.
- Martin Blum, M. K. (2013). *Infrastructure as an Asset Class: Investment Strategy, Sustainability, Project Finance and PPP*. Dalam M. K. Martin Blum, *Infrastructure as an Asset Class: Investment Strategy, Sustainability, Project Finance and PPP*. Wiley.
- Ngwira, M. (2015). *Public Sector Property Asset Management*. Dalam M. Ngwira, *Public Sector Property Asset Management*. Routledge.
- Permana, A. (2019). *Mendorong Manajemen Infrastruktur Publik yang Berkelanjutan*. Institut Teknologi Bandung .
- Putra, I. (2024). *Manajemen Aset*. CV. Penerbitan Deva.
- Razif, M. (2018). Peranan Aspek Lingkungan dalam Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2(2).
- Saepudin, E. A. (2024). Evaluasi Efektivitas Manajemen Aset Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Banten. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1888–1892. doi:<https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2766>
- Sidik, M. (2017). *Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal*. Artikel DJKN Kementerian Keuangan RI.
- Suprayitno, H. &. (2018). PEMIKIRAN AWAL TENTANG KERANGKA DASAR ANALISIS INFRASTRUKTUR PUBLIK BAGI PEMBANGUNAN. *PTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 159-164.
- Suprayitno, H. &. (2019). Pemikiran awal tentang prinsip tindakan mitigasi preventif resiko bencana alam bagi manajemen aset infrastruktur & fasilitas. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 3.
- Tjernberg, L. B. (2018). *Infrastructure Asset Management with Power System Applications*. Dalam L. B. Tjernberg, *Infrastructure Asset Management with Power System Applications*. CRC Press.